

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI INDONESIA: ASPEK-ASPEK PENTING UNTUK OPERASIONALISASINYA

Oleh **Budhy Tjahjati S. Soegijoko**

In the future, there will be a shift in the pattern of managing urban development activities. Conventional method that is oriented more on the physical aspect, relied more on the government ideas and initiative, referred more on the historical development trend and more "inward looking" toward the country, will not be appropriate to be used as the basis of urban development management in the future. To face all those challenges, a new breakthrough in managing urban development is needed.

Daerah perkotaan di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam dekade terakhir. Jumlah penduduk perkotaan meningkat dengan laju 5,5% per tahun pada kurun waktu 1980-1990, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,97% per tahun. Tingkat pertumbuhan tersebut juga jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk perdesaan yang hanya 0,8% per tahun dalam kurun waktu yang sama. Kondisi tersebut telah mengakibatkan semakin meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, yaitu dari 32,8 juta jiwa atau 22% dari total penduduk pada tahun 1980 menjadi 55,9 juta jiwa atau 31% pada tahun 1990. Diperkirakan pada akhir PJP II jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 139,8 juta jiwa atau separuh dari total penduduk.

Kondisi perkembangan daerah perkotaan di Indonesia juga dicirikan ketidakseimbangan penyebarannya, baik antara pulau-pulau maupun antara berbagai ukuran kota. Pada akhir Repelita V, 59,4% penduduk perkotaan mendiami kota-kota di Jawa; 15,8% di Sumatera, 5,7% di Sulawesi dan 11,7% di pulau Kali-

mantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Kenyataan ini merupakan salah satu indikasi adanya ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa mengingat kota-kota yang merupakan pusat pengembangan wilayah terkonsentrasi di Jawa. Akibat hal ini, juga terlihat adanya ketimpangan dalam hal perkembangan daerah. Untuk itu, usaha-usaha yang dapat memacu pembangunan kota-kota di luar Jawa perlu lebih digalakkan baik melalui peningkatan investasi sarana, prasarana maupun pelayanan serta peningkatan kegiatan yang dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, kota-kota metropolitan dan kota-kota besar masih tetap akan menjadi tujuan migrasi ke perkotaan. Pada akhir Repelita V, sebesar 34,3% penduduk perkotaan tinggal di metropolitan, 11,62% di kota-kota besar, 21,60% di kota-kota sedang dan sisanya sebesar 32,4% di kota-kota kecil. Dalam PJP II diperkirakan jumlah penduduk metropolitan akan meningkat 1,5 kali lipat, sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di kota-kota besar, sedang dan kecil akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dengan demikian, pada akhir PJP II penduduk perkotaan diperkirakan akan terdistribusi seba-

Budhy Tjahjati S. Soegijoko

Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
Bidang Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Keterpaduan dalam Pembangunan

*Pengarahan disampaikan pada Muskomwil BKS-AKSI Wilayah III
Palembang, 13-14 Maret 1995

gai berikut: 38,18% tinggal di metropolitan, 12,90% di kota-kota besar; 20,2% di kota-kota sedang dan 28,10% di kota-kota kecil. Melihat hal tersebut di atas, perhatian perlu diberikan tidak hanya pada kota-kota metropolitan dan besar, tapi juga pada kota-kota sedang dan kecil, agar tercapai perkembangan perkotaan yang seimbang.

Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa daerah perkotaan berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Kontribusi daerah perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada tahun 1993 adalah sekitar 44%. Diperkirakan kontribusi ini akan meningkat menjadi sekitar 60% pada akhir PJP II sejalan dengan semakin terkonsentrasinya investasi kegiatan ekonomi terutama industri, perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan. Sebagai pusat pengembangan wilayah, pembangunan daerah perkotaan tidak terlepas dari pembangunan daerah pedesaan. Dengan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan yang semakin maju dan murah, keterkaitan fungsional antara keduanya menjadi semakin tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan yang berlokasi di daerah perkotaan akan memberikan dampak yang besar bagi pengembangan daerah pedesaan.

Adalah suatu kenyataan bahwa daerah-daerah perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, teknologi, informasi dan inovasi telah menjadi bagian dari sistem kota-kota global sebagai akibat dari adanya jaringan transportasi yang sangat maju dan adanya sistem produksi barang dan jasa yang terspesialisasi namun terkait satu sama lain. Fenomena ini di satu pihak sangat menggembirakan karena daerah perkotaan mempunyai peluang untuk terus meningkatkan kegiatannya karena daerah perkotaan mempunyai peluang untuk terus meningkatkan kegiatannya dalam bidang ekonomi maupun sosial. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan dampak negatifnya terutama jika pola tersebut tidak dikaitkan dengan perkembangan daerah pedesaan. Menjadi bagian dari sistem kota-kota global berarti pula bahwa kota-kota di Indonesia harus mampu bersaing secara kompetitif dengan kota-kota di negara lain baik untuk investasi maupun sebagai tempat tinggal

yang nyaman dan aman. Ini menjadi tantangan bagi kita semua.

Disadari, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah perkotaan di negara ini. Ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana kota masih sangat terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup terutama di kota-kota besar dan metropolitan cenderung menurun, terutama kualitas air tanah, air permukaan dan kualitas udara. Kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas masih menonjol, sementara permukiman-permukiman kumuh cenderung bertambah. Selain itu, kemampuan pemerintah kota semakin meningkat sangat terbatas. Demikian juga halnya dengan perangkat lunak, seperti peraturan perundangan misalnya, yang mengatur kegiatan pembangunan kota masih belum dapat mengikuti dinamika perkembangan daerah perkotaan.

Perkembangan daerah perkotaan di negara ini juga dicirikan oleh semakin berperannya masyarakat dan dunia usaha dalam mengarahkan kegiatan pembangunan perkotaan. Hal ini merupakan salah satu penyebab di samping pengaruh globalisasi, mengapa dinamika perubahan pembangunan perkotaan begitu cepat, sehingga sarana, prasarana dan pelayanan kota yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan. Demikian juga pemanfaatan sumber daya alam seperti air, lahan dan energi cenderung dilakukan tanpa rencana yang menyeluruh dan kurang efisien sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan dan berkelanjutan pembangunan.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa permasalahan dan tantangan pembangunan daerah perkotaan untuk sekarang dan masa yang akan datang menjadi lebih banyak dan lebih kompleks, baik dalam hal keragaman maupun intensitasnya. Strategi pembangunan perkotaan dimasa yang akan datang tidak saja perlu dibedakan menurut pulau dan ukuran kota, tetapi juga menurut tuntutan kebutuhan dan kecepatan dinamika pembangunan.

Sebagaimana diketahui bersama, kita telah memiliki Kebijakan Pembangunan Perkotaan di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1987, walaupun lebih ditekankan pada pemba-

ngunan prasarana perkotaan. Secara garis besar, kebijaksanaan tersebut memuat dua hal penting, yaitu kebijaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu (P3KT) dan peningkatan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah DATI II (kota) untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kota tersebut (desentralisasi otonomi). Melihat kecenderungan perkembangan dan tantangan pembangunan daerah-daerah perkotaan di Indonesia di masa yang akan datang, jelaslah bahwa kebijaksanaan pembangunan perkotaan tersebut yang lebih menekankan pada pembangunan prasarana sudah tidak memadai lagi. Dengan demikian, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan perkotaan di Indonesia untuk masa yang akan datang perlu dirumuskan lagi menurut tuntutan kebutuhan pembangunan perkotaan.

Sehubungan dengan pembangunan perkotaan, GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) pembangunan perumahan dan permukiman dilanjutkan dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan kehidupan, pertumbuhan wilayah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan perdesaan dan perkotaan, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyasikan laju pertumbuhan antardaerah, antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membuka daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggungjawab kepada daerah, khususnya daerah otonom dengan tetap mengacu pada arah dan tujuan pembangunan nasional serta upaya perwujudan Wawasan Nusantara. Amanat ini dijabarkan dalam Repelita VI, buku II bab XVII tentang kebijaksanaan pembangunan perkotaan dan perdesaan berikut ini.

Sasaran Pembangunan Daerah Perkotaan PJP II adalah:

1. Terwujudnya keserasian dan keseimbangan pembangunan antara desa-kota, antar desa dan antar kota.
2. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera secara merata.
3. Teratasinya masalah kemiskinan di perkotaan
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan yang sehat serta lestari.

Dari sasaran PJP II tersebut, dalam Repelita VI sasaran tersebut lebih diarahkan pada:

1. Terselenggaranya pengelolaan pembangunan perkotaan yang lebih tertib dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alamnya, mengacu pada rencana tata ruang yang berkualitas, termasuk pengelolaan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan adil ditunjang kelembagaan pemerintah yang makin siap melaksanakan otonomi daerah.
2. Makin mantapnya kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, baik melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya, maupun pengusaha perseorangan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan kualitas hidup penduduk yang makin merata;
4. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di perkotaan;
5. Meningkatnya kualitas fisik lingkungan di perkotaan sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Sasaran-sasaran tersebut dicapai melalui berbagai kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memantapkan sistem perkotaan, meliputi upaya:
 - menyelenggarakan pembangunan perkotaan dengan mempertimbangkan peranan dan fungsi kota serta keterkaitannya dalam menunjang kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dalam sektor strategis.
 - mendukung penyebaran kegiatan ekonomi sekaligus sebagai penyangga aglomerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan yang sudah berkembang cepat menunjang pengembangan wilayah baru
 - memantapkan stabilitas dan pertahanan keamanan

- mengarahkan perkembangan kota dengan pemberian insentif yang menarik
 - penyederhanaan prosedur investasi
 - peningkatan pelayanan prasarana pendukung ekonomi kota.
2. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas kota, dengan cara:
 - mengembangkan kemampuan pemerintah daerah, terutama kota besar dan kota metropolitan untuk melaksanakan investasi pembangunan secara mandiri
 - meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah
 - merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi yang merupakan sektor andalan melalui pembentukan sentra produksi serta penyediaan sarana dan prasarana angkutan guna peningkatan aksesibilitas antara desa dan kota
 - memanfaatkan ruang dan potensi kota secara efisien melalui kegiatan penataan kota dan penataan bangunan.
 3. Meningkatkan kemampuan SDM melalui pemantapan pengembangan SDM melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama kejuruan dan ketrampilan; mengembangkan penyuluhan yang efektif khususnya untuk meningkatkan kesadaran, kedisiplinan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota; serta meningkatkan kualitas aparat Pemerintah Daerah melalui pelatihan sejalan dengan pengembangan jabatan dan kebutuhan Pemerintah bersangkutan.
 4. Memantapkan kelembagaan dan kemampuan keuangan perkotaan, yaitu:
 - menyempurnakan kelembagaan pemerintah kota melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan kota disesuaikan dengan kondisi dan tipologi daerahnya
 - perbaikan struktur organisasi pemerintah kota
 - pemenuhan kelengkapan unit fungsional dan peningkatan kemampuan aparatnya
 - memantapkan kapasitas keuangan pemerintah kota terutama peningkatan pendapatan kota dan efisiensi penggunaannya, penggunaan dana masyarakat, dunia usaha, dan pinjaman daerah
 5. Melembagakan pengelolaan pembangunan terencana dan terpadu, meliputi upaya:
 - menyempurnakan mekanisme hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, terutama mekanisme pinjaman daerah dan bantuan dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan pemerintah kota/daerah dan BUMD.
 - menyelenggarakan pembangunan perkotaan secara terpadu antarsektor bagi kota yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, kota dengan permasalahan khusus, kota dengan tingkat urbanisasi tinggi, kota baru, serta kota yang berkembang pesat
 - menyelenggarakan pembangunan perkotaan secara sektoral untuk kota atau bagian kota yang tidak terlalu rumit permasalahannya dan perlu dipacu pemenuhan kebutuhan dasar penduduknya terutama golongan berpenghasilan rendah memantapkan dan
 - melembagakan penyusunan program pembangunan perkotaan jangka menengah dalam kerangka mekanisme perencanaan pembangunan kota
 - mengembangkan dan melembagakan fungsi koordinasi di semua tingkatan pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perkotaan serta pembiayaannya.
 6. Memantapkan perangkat peraturan pendukung pembangunan perkotaan, dimana peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan perkotaan dilengkapi dan dimantapkan sesuai dengan kondisi dan tipologi daerahnya guna memperlancar pelaksanaan pembangunan, pemerataan hasil-hasilnya, dan mengendalikan dampak negatif pembangunan.
 7. Meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan, mencakup:
 - menetapkan dan menerapkan baku mutu lingkungan
 - menetapkan dan memasyarakatkan peraturan pengendalian pencemaran lingkungan di daerah perkotaan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungannya
 - melembagakan pembangunan perkotaan yang mengacu pada rencana tata ruang yang berkualitas dan operasional
 - mengendalikan peruntukan tanah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan melalui tertib administrasi pertanahan

- memantapkan keamanan dan kesejahteraan lingkungan di perkotaan melalui penanganan kesenjangan dan konflik sosial serta kriminalitas

Kebijaksanaan perkotaan Repelita VI baru merupakan langkah awal kegiatan pembangunan perkotaan yang dibutuhkan secara menyeluruh untuk PJP II. Namun demikian, kebijaksanaan pembangunan perkotaan yang telah dirumuskan dan sedang dilaksanakan dalam Repelita VI merupakan suatu awal dari suatu pekerjaan besar dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan pada PJP II. Oleh karena itu, kebijaksanaan tersebut perlu terus dilanjutkan dan dijaga kesinambungannya dengan kebijaksanaan tindak pembangunan perkotaan di PJP II.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa arah pembangunan perkotaan perlu diantisipasi dan dipersiapkan sedini mungkin, agar selalu dapat meningkatkan produktivitas daerah perkotaan, menangkap peluang yang ada, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan timbul. Dalam konteks ini, kini sedang dirumuskan kebijaksanaan untuk langkah-langkah operasional pembangunan perkotaan untuk PJP II, di mana di dalamnya mencakup pula kebijaksanaan dan program-program pembangunan perkotaan untuk Repelita VI. Kebijaksanaan tindak pembangunan perkotaan PJP II diharapkan dapat menjadi payung bagi perumusan program pembangunan perkotaan untuk lima Repelita secara berkesinambungan.

Sebagai informasi dapat disampaikan, bahwa untuk kebijaksanaan tindak pembangunan perkotaan untuk PJP II adalah sebagai berikut:

1. *Tujuan pertama*, adalah terciptanya desentralisasi dalam pembangunan perkotaan dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada daerah tingkat II; yang ingin dicapai dengan *kebijaksanaan-kebijaksanaan tindakan* :
 - a. Meningkatkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Dati II dalam menyusun, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan kota;
 - b. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Dati II dalam mengelola pembangunan perkotaan.
2. *Tujuan kedua*, adalah semakin meningkat dan mantapnya peran swasta dan masya-

rakat serta kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan; yang akan dicapai dengan *kebijaksanaan-kebijaksanaan tindakan*:

- a. Meningkatkan pendayagunaan kekuatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan swasta dalam pembangunan perkotaan;
 - b. Meningkatkan dan memantapkan peran Pemerintah sebagai 'pemampu' untuk mendorong peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan;
 - c. Menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan perkotaan;
 - d. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan perkotaan.
3. Tujuan ketiga, adalah semakin baiknya pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, ekonomi dan kehidupan budaya masyarakat perkotaan; yang dapat dicapai melalui *kebijaksanaan-kebijaksanaan tindakan* :
 - a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi fisik, sosial, dan budaya masyarakat perkotaan;
 - b. Meningkatkan akses masyarakat perkotaan terhadap kepastian hukum yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan;
 - c. Meningkatkan peluang dan lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat terutama dalam rangka pemerataan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
 - d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana penunjang bagi segenap lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah;
 - e. Menyelenggarakan penataan penguasaan dan penggunaan lahan perkotaan secara berencana, efisien, efektif dan terpadu sehingga tercapai pola pemanfaatan lahan yang optimal dengan mempertimbangkan hak masyarakat, fungsi sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan;
 - f. Meningkatkan sistem transportasi perkotaan yang efisien, nyaman, murah terjangkau setiap lapisan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

4. Tujuan keempat, adalah mantapnya peran kota-kota dalam pembangunan wilayah dan nasional; yang ingin dicapai dengan *kebijaksanaan-kebijaksanaan tindakan*:
 - a. Mengembangkan sistem kota yang dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan dan kegiatan ekonomi kota;
 - b. Mengembangkan "urban governance" yang dapat mewujudkan fungsi dan tingkat pelayanan kota menurut sistem kota yang optimal;
 - c. Mengembangkan hubungan desa-kota termasuk daerah 'megaurban' yang dapat mendorong dan menyaserasikan pembangunan antara desa dan kota;
 - d. Meningkatkan produktivitas daerah perkotaan dalam rangka mempercepat tercapainya fungsi kota yang diinginkan dalam sistem kota.
5. Tujuan kelima, adalah terselenggaranya pembangunan perkotaan yang semakin efisien, efektif dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan; yang ingin dicapai melalui *kebijaksanaan tindakan*:
 - a. Menyempurnakan mekanisme kerja dan organisasi lembaga-lembaga pengelola daerah sehingga tercipta pembagian wewenang yang jelas dan koordinasi yang baik;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan dana-dana pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat;
 - c. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, lahan dan energi serta mendorong penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan tentang permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan pada masa mendatang, kebijaksanaan tersebut perlu dijabarkan secara lebih operasional. Kebijakan tindakan-tindakan tersebut perlu dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran yang lebih kongkrit dan program-program jangka menengah serta program-program tahunan yang lebih rinci dan lebih disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Untuk kebutuhan ini, perlu disarikan di sini aspek-aspek penting yang menjiwai strategi dan kebijaksanaan pembangunan perkotaan tersebut sebagai jawaban dari permasalahan dan tuntutan pembangunan perkotaan, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi perumusan program-program pembangunan perkotaan.

Pertama, pembangunan daerah perkotaan merupakan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang meliputi kegiatan-kegiatan sektoral termasuk penyediaan dan pengelolaan pembangunan sarana, prasarana, pelayanan, perumahan dan lingkungan termasuk pertanahan. Artinya, pembangunan perkotaan menyangkut keterpaduan kegiatan multi-sektor dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Kedua, daerah perkotaan sedang dan akan terus mengalami transformasi fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang cepat. Artinya, pola pengelolaan pembangunan perkotaan yang diperlukan adalah yang dinamis dan proaktif, yaitu harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan dan tuntutan kebutuhan, dapat menangkap peluang yang ada serta mampu mencegah terjadinya dampak negatif.

Ketiga, secara ruang, pembangunan perkotaan mempunyai lingkup yang luas. Perkotaan tidak saja harus dilihat dalam konteks kota-kota secara individu, tetapi juga keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan, keterkaitan antar kota dalam sistem kota-kota nasional serta kedudukan kota-kota nasional dalam sistem kota-kota global.

Keempat, penanganan pembangunan daerah perkotaan pada masa yang akan datang tidak saja mencakup aspek perencanaan fisik, tetapi yang menjadi semakin penting adalah manajemen kota yang terpadu, efisien, efektif. Selain itu, pembangunan daerah perkotaan bukan lagi didominasi oleh peran pemerintah, sebaliknya peran masyarakat dan dunia usaha akan semakin besar. Dengan demikian, aktor-aktor dari kegiatan pembangunan perkotaan adalah pemerintah, masyarakat dan swasta yang secara bersama-sama akan membentuk pola pembangunan daerah perkotaan kita di masa yang akan datang. Implikasinya, pola pengelolaan pembangunan perkotaan di masa yang akan datang merupakan hasil dari keputusan-keputusan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan yang diambil oleh ketiga aktor tersebut. Dengan kata lain, kegiatan 'negosiasi, mediasi dan advokasi' di antara ketiga aktor tersebut akan menjadi semakin penting dalam proses pembangunan perkotaan. Peran pemerintah sebagai 'provider' akan bergeser menjadi 'enabler' dan 'regulator' untuk meningkatkan

peran serta masyarakat dan dunia usaha namun tetap mengusahakan pemerataan dan kelestarian lingkungan. Dengan tuntutan seperti ini, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintah, masyarakat dan swasta yang tidak saja lebih baik dari kondisi sekarang, namun juga yang mempunyai keluwesan persepsi tentang perubahan peranan setiap aktor dalam pembangunan perkotaan. Aparat pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang dapat mengambil keputusan akhir, namun harus bersama-sama dengan masyarakat dan swasta. Kesiapan untuk mengubah persepsi dan sikap inilah yang semakin diperlukan di kemudian hari, jika kita menginginkan pola pengelolaan pembangunan perkotaan yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Kelima, sebagai konsekuensi dari aspek keempat di atas, desentralisasi dari urusan-urusan yang ditangani pemerintah pusat dan pemerintah DATI I kepada pemerintah DATI II merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan kegiatan pembangunan daerah perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga kota-kota kita dapat meningkatkan daya saingnya dengan kota-kota di negara lain dalam menarik investasi, terutama dalam hubungan kemitraan antarnegara dalam pembangunan yang akhir-akhir ini banyak dikembangkan (IMTGT, BIMPEA, SIJORI dan Sabah-Davao-Sulut). Untuk ini, berbagai upaya yang telah dilakukan bagi pemerintah kota perlu lebih ditingkatkan lagi misalnya peningkatan kemampuan aparatur, penyempurnaan organisasi dan tata cara kerja serta peningkatan kemandirian dalam membiayai pembangunan kota. Sekali lagi, diperlukan aparat pemerintah yang bukan saja mempunyai profesionalisme yang tinggi, tetapi juga mampu mengubah persepsinya bahwa peran pemerintah pusat dan Dati I harus dapat menjadi 'enabler' bagi peningkatan peran pemerintah Dati II perkotaan.

Keenam, pembangunan perkotaan pada hakekatnya memiliki misi untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan nasional, antara lain melalui peningkatan produktivitas; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pe-

ngentasan masyarakat dari kemiskinan. Dengan demikian, program-program pembangunan yang terkait dengan perkotaan harus direncanakan dan diwujudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pada masa yang akan datang pola-pola pengelolaan kegiatan pembangunan perkotaan akan mengalami pergeseran dari yang selama ini kita lakukan. Cara-cara konvensional, yang tadinya lebih berorientasi kepada aspek fisik, lebih mengandalkan prakarsa dan inisiatif pemerintah, lebih mengacu kepada 'trend' perkembangan historis, dan lebih 'inward looking' ke dalam negara kita sendiri, sudah kurang cocok lagi untuk dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan pembangunan perkotaan kita di masa yang akan datang. Terobosan-terobosan baru dalam menangani pembangunan perkotaan kita sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Budhy Tjahjati S. Soegijoko, *Masalah-masalah Penyediaan Tanah dalam Hubungan dengan Pengembangan Kota*, Lokakarya DPR-RI tentang "Masalah Pertanahan di Indonesia", Jakarta, November 1993
- Budhy Tjahjati S. Soegijoko, *Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan Sebagai Bagian dari Strategi Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang*, Bappenas, Mei 1990
- Budhy Tjahjati S. Soegijoko, *Urban Growth Industrial Development and Migration, Colloquium on Poverty & Development in Indonesia*, The Hague, April 1991
- Budhy Tjahjati S. Soegijoko, *Toward an Integrated Urban Informal Sector Policy & Strategy for Indonesia*, "Seminar on Employment Policies, ILO, Bangkok
- Budhy Tjahjati S. Soegijoko, *Pembangunan Usaha Menengah dan Kecil di Daerah Perkotaan dan Perdesaan: Permasalahan dan Kebijakan*, "Seminar Intern Bappenas", September 1994
- George Chadwick, *Models of Urban and Regional System in Developing Countries: Some Theories and Their Application in Physical Planning*, Pergamon, New York, 1987
- Gabriel Roth, *The Private Provision of Public Services in Developing Countries*, EDI Series in Economic Development, Oxford University, New York, 1988
- Kolama Chandrakirana dan Isono Sadoko, *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*, CPIS, 1994
- Robert van der Hoff, *Innovative Approaches to Urban Management*